

KERANGKA ACUAN KERJA
JASA KONSULTANSI PERORANGAN PENYUSUNAN MATERI
PEMBELAJARAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

K/L/PD	:	Pemerintah Provinsi X
Unit Organisasi Eselon I	:	Sekretariat Daerah
Program	:	Peningkatan kompetensi SDM di Provinsi X
Sasaran Program	:	Terpenuhinya peningkatan SDM di Pemerintah Provinsi X melalui bimbingan teknis *Peningkatan Kualitas SDM
Indikator Kinerja Program	:	Tercapainya 100% SDM di Pemerintah Provinsi X yang mengikuti program pengembangan kompetensi *Meningkatnya kualitas SDM di Pemerintah Provinsi X
Unit Organisasi Eselon II Kegiatan	:	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyusunan Bahan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan
Sasaran Kegiatan	:	Tersedianya satu paket Penyusunan Bahan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan berupa modul, bahan tayang dan bahan evaluasi *Meningkatkan kompetensi Pengelola Keuangan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	5 Modul, 5 Bahan Tayang, 5 Bahan Evaluasi *100% Peserta Lulus Bimtek Pengelolaan Keuangan
Keluaran (<i>Output</i>)	:	Tersedianya satu paket Penyusunan Bahan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan *Modul, Bahan Tayang, Bahan Evaluasi dan Laporan
Indikator Keluaran(<i>Output</i>)	:	Modul, bahan tayang dan bahan evaluasi yang mencakup beberapa materi yaitu ruang lingkup kebijakan keuangan daerah, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, penerapan kebijakan terkait pengelolaan barang, mekanisme pendapatan dan belanja negara, penerapan akuntansi dan pelaporan sistem penganggaran *Modul, Bahan Tayang, Bahan Evaluasi dan Laporan
Volume Keluaran (<i>Output</i>)	:	1 Paket Penyusunan Bahan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan

Satuan Ukur Keluaran (Output) : *5 Modul, 5 Bahan Tayang, 1 Bahan Evaluasi dan 1 Laporan
1. Modul
2. Bahan Tayang
3. Bahan Evaluasi
*5 Modul, 5 Bahan Tayang, 1 Bahan Evaluasi dan 1 Laporan

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. Salah satu upaya mengembangkan kompetensi **SDM di lingkungan Provinsi X** adalah melalui bimbingan teknis. Bimbingan teknis diperlukan untuk mengembangkan keterampilan teknis jabatan, salah satunya adalah jabatan pengelola keuangan.

~~Penyelenggaraan bimbingan teknis bagi pengelola keuangan perlu persiapan, salah satunya adalah persiapan bahan bimbingan teknis pengelola keuangan agar substansi yang akan dipelajari pada bimbingan teknis tersebut, sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan pengelola keuangan. Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan Bahan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan berupa modul, bahan tayang dan bahan evaluasi.~~

B. Tujuan

Tujuan kegiatan Penyusunan Materi Pembelajaran Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan tersedianya satu paket Penyusunan Bahan/Materi Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan **yang dapat diterapkan pada kegiatan sehari-hari.**

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penyusunan Materi Pembelajaran Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan **yang terdiri dari materi (1) Ruang lingkup kebijakan keuangan daerah, (2)**

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, (3) Penerapan kebijakan terkait pengelolaan barang, (4) Mekanisme pendapatan dan belanja negara, (5) Penerapan akuntansi dan pelaporan sistem penganggaran, meliputi:

1. Penyusunan Modul ~~(1) Ruang lingkup kebijakan keuangan daerah, (2) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, (3) Penerapan kebijakan terkait pengelolaan barang, (4) Mekanisme pendapatan dan belanja negara, (5) Penerapan akuntansi dan pelaporan sistem penganggaran~~
2. Penyusunan Bahan Tayang ~~(1) Ruang lingkup kebijakan keuangan daerah, (2) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, (3) Penerapan kebijakan terkait pengelolaan barang, (4) Mekanisme pendapatan dan belanja negara, (5) Penerapan akuntansi dan pelaporan sistem penganggaran~~
3. Penyusunan Bahan Evaluasi yang mencakup seluruh materi ~~(1) Ruang lingkup kebijakan keuangan daerah, (2) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, (3) Penerapan kebijakan terkait pengelolaan barang, (4) Mekanisme pendapatan dan belanja negara, (5) Penerapan akuntansi dan pelaporan sistem penganggaran~~
4. Laporan Penyusunan Materi Pembelajaran.

D. Kualifikasi

1. Pendidikan minimal S2 Manajemen Keuangan
2. Memiliki pengalaman dalam menulis modul sejenis minimal 3 kali
**(dalam satu tahun terakhir)*
3. Memiliki sertifikat pengajar **(pengelola keuangan)*
4. Bertempat tinggal di kota domisili BPSDM Provinsi X

E. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tugas

Konsultan perorangan wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sesuai yang tertuang dalam KAK ini.

2. Tanggung Jawab

Konsultan perorangan bertanggung jawab kepada Penyedia jasa bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/**Kepala BPSDM Provinsi X** melalui Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penanggung jawab kegiatan.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat ini secara khusus adalah **seluruh peserta Bimtek Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Provinsi X dan secara umum adalah SDM di lingkungan Provinsi X.**

F. OUTPUT

Adapun *output* yang harus dihasilkan oleh konsultan dalam bentuk penyusunan modul, bahan tayang dan bahan evaluasi yang meliputi materi:

1. ruang lingkup kebijakan keuangan daerah,
2. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
3. penerapan kebijakan terkait pengelolaan barang,
4. mekanisme pendapatan dan belanja negara,
5. penerapan akuntansi dan pelaporan sistem penganggaran,

dan laporan akhir kegiatan Penyusunan Materi Pembelajaran bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

G. Waktu yang Diperlukan

Waktu pelaksanaan pembuatan kegiatan adalah selama **2 (dua)** 3 (tiga) bulan, dari ~~15~~ **pertengahan** Januari s.d. ~~15~~ **pertengahan** Maret 2022.

H. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang dianggarkan untuk Jasa Konsultansi perorangan Penyusunan Materi Pembelajaran Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan adalah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menggunakan anggaran DPA BPSDM Provinsi X tahun anggaran 2022.

(Kota X, 2 Januari 2022)

PPK BPSDM Provinsi X

(Annisa Rahmawati)

NIP 199009012014032002